

**ANALISIS KETERKAITAN INDEKS
INKLUSI KEUANGAN TERHADAP
KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN
PENDAPATAN JAWA TENGAH 2010-2014**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

MARLINA FRANSISKA PURBA

NIM. 12020112130070

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2016

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Marlina Fransiska Purba
Nomor Induk Mahasiswa : 12020112130070
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan
Judul Skripsi : **ANALISIS KETERKAITAN INDEKS
INKLUSI KEUANGAN TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN DAN
KETIMPANGAN PENDAPATAN JAWA
TENGAH 2010-2014.**
Dosen Pembimbing : Evi Yulia Purwanti,SE.,MSi

Semarang, 22 Agustus 2016

Dosen Pembimbing,

(Evi Yulia Purwanti,SE.,MSi)

NIP. 19710725 1997022001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Marlina Fransiska Purba
Nomor Induk Mahasiswa : 12020112120008
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan.
Judul Skripsi : **ANALISIS KETERKAITAN INDEKS
INKLUSI KEUANGAN TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN DAN
KETIMPANGAN PENDAPATAN JAWA
TENGAH 2010-2014.**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 1 September 2016

Tim Penguji

1. Evi Yulia Purwanti, SE., MSi (.....)
2. Dr. Nugroho SBM, Msi. (.....)
3. Firmansyah, SE., MSi., Ph.D (.....)

Mengetahui,
Pembantu Dekan I

(Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Akt.)

NIP. 19670809 199203 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Marlina Fransiska Purba, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“ANALISIS KETERKAITAN INDEKS INKLUSI KEUANGAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN JAWA TENGAH 2010-2014”** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 22 Agustus 2016
Yang membuat pernyataan,

(Marlina Fransiska Purba)
NIM. 12020112130070

ABSTRAK

Inklusi keuangan menjadi agenda penting dan merupakan salah satu strategi baru dalam pembangunan di berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi inklusi keuangan pada kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah serta untuk menguji dan menganalisis pengaruh indeks inklusi keuangan terhadap tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Indeks inklusi keuangan diukur melalui indikator penetrasi perbankan, aksesibilitas perbankan dan juga penggunaan rekening. Kemiskinan diukur dengan tingkat kemiskinan yang menggambarkan penduduk miskin dalam masing-masing wilayah dan pemerataan pendapatan diukur menggunakan indeks gini. Jenis penelitian ini adalah eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data sekunder 31 kab/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Metode yang digunakan adalah analisis indeks inklusi keuangan dan analisis uji hubungan kausalitas antara indeks inklusi keuangan terhadap tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan.

Secara keseluruhan indeks inklusi keuangan di kabupaten/kota Jawa Tengah termasuk dalam kategori indeks inklusi keuangan yang rendah, hanya dua wilayah yaitu Kabupaten/Kota Semarang dan Kota Surakarta yang memiliki indeks inklusi keuangan yang tinggi. Hasil uji kausalitas indeks inklusi keuangan terhadap indeks gini menunjukkan hubungan satu arah dimana indeks gini mempengaruhi indeks inklusi keuangan. Sedangkan hubungan kausalitas indeks inklusi keuangan dengan tingkat kemiskinan menunjukkan tidak adanya hubungan kausalitas.

Kata Kunci: Akses Jasa Keuangan, Indeks Inklusi Keuangan, Inklusi Keuangan, Kemiskinan, Indeks Gini.

ABSTRACT

Financial inclusion becomes an important agenda and is one of the new strategies in development in various countries. This study aims to determine the condition of financial inclusion in the cities and regencies in Central Java province, moreover to examine and analyze the effect of financial inclusion index on poverty and income distribution. Index of financial inclusion is measured through indicators of banking penetration, accessibility of banking, and the usage of bank account. Poverty is measured by the level of poverty which describes the poor in each region and income distribution were measured using the Gini index. This type of research is explanatory with quantitative approach using secondary data in 31 districts / cities in Central Java province.

The analytical method used is the analysis of the index of financial inclusion and analysis test causality relationship between financial inclusion index on poverty and income distribution .

Overall index of financial inclusion in the districts / cities in Central Java included in the category of low financial inclusion index , only two regions of the Regency / City of Semarang and Surakarta have a high index of financial inclusion . Causality test results of the financial inclusion index to the Gini index shows the relationship the Gini index influences the index of financial inclusion . While causality index of financial inclusion with poverty rates showed no causality .

Keywords : Access Financial Services , Financial Inclusion Index , Financial Inclusion , Poverty , Gini index.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan karunia-Nya penulis sampai saat ini masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “*Analisis Keterkaitan Indeks Inklusi Keuangan Terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Jawa Tengah 2010-2014*” adalah suatu hal yang mustahil tentunya bila skripsi ini bisa selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis bermaksud mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Suharnomo S.E. M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Akhmad Syakir Kurnia, SE.,Msi.,Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Ibu Evi Yulia Purwanti,SE.,MSi selaku Dosen Pembimbing skripsi atas waktu, perhatian, arahan dan segala bimbingan kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Terima kasih juga atas ilmu yang diberikan kepada saya.
4. Bapak Dr.Hadi Sasana, SE., M.Si selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi selama perkuliahan ini.
5. Semua dosen, jajaran staff, petugas FEB UNDIP yang telah memberikan ilmu dan fasilitas selama penulis menjalani masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua tercinta Ibu Rata Simanjuntak dan Bapak Buha Purba, Abangku Sutan Bratha Purba dan Anton Clinton Purba serta segenap keluarga

besar untuk kasih sayang, kepercayaan, didikan, arahan, motivasi, doa serta kesabaran kepada penulis selama ini.

7. Bapak Iwan selaku tim data dan statistik Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah yang membantu dalam pengumpulan data-data yang diperlukan penulis dalam melakukan penelitian ini.
8. Sahabat-sahabatku Wahyu Fitriyanti, Ninda, Melia ,Rosediana, Ratih, Yunita, teman-teman kos Grace Two Pratiwi Genesi, Juliade ,Octavia yang telah memberikan banyak kenangan dan menjadi teman seperjuangan baik dari awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga besar IESP 2012 untuk persaudaraan dan kerjasama selama perkuliahan di FEB UNDIP, semoga sukses menggapai cita-cita.
10. Pihak-pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tanpa dukungan dari pihak-pihak diatas, tentunya penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan bagi perbaikan dimasa yang akan datang. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, Agustus 2016

Penulis

Marlina Fransiska Purba

NIM 12020112130070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
1.4 Sistematika Penulisan	16
BAB II TELAAH PUSTAKA	18
2.1 Kemiskinan	18
2.1.1 Teori Kemiskinan.....	23
2.1.2 Indikator Kemiskinan.....	26
2.2 Ketimpangan Distribusi Pendapatan.....	31
2.2.1 Definisi Ketimpangan Distribusi Pendaoatan	31
2.2.2 Ukuran Distribusi Pendapatan.....	36
2.3 Inklusi Keuangan	39
2.3.1 Indikator Inklusi Keuangan.....	42
2.4 Penelitian Terdahulu	45
2.5 Hubungan Inklusi Keuangan Terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan..	48
2.6 Hubungan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Inklusi Keuangan	51
2.7 Kerangka Pemikiran	53
2.8 Hipotesis Penelitian	55

BAB III METODE PENELITIAN.....	56
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	56
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	58
3.3 Metode Analisis Data.....	59
3.3.1 Indeks Inklusi Keuangan.....	59
3.3.2 Uji Kausalitas Granger.....	64
3.3.3 Uji Akar Unit.....	67
3.3.4 Uji Kointegrasi Data Panel.....	68
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	71
4.1 Gambaran Umum Wilayah.....	71
4.1.1 Letak dan Keadaan Geografis.....	71
4.1.2 Kondisi Perekonomian.....	72
4.1.3 Kondisi Kesejahteraan Masyarakat.....	75
4.1.4 Kondisi Demografi.....	79
4.1.5 Gambaran Umum Perbankan Jawa Tengah.....	81
4.2 Analisis Data dan Pembahasan.....	87
4.2.1 Indikator Penetrasi Perbankan.....	87
4.2.2 Indikator Ketersediaan Perbankan.....	89
4.2.3 Indikator <i>Usage</i> (Kegunaan).....	91
4.2.4 Dimensi Indeks Inklusi Keuangan.....	94
4.2.5 Dimensi Indikator Penetrasi Perbankan.....	95
4.2.6 Dimensi Ketersediaan Perbankan.....	97
4.2.7 Dimensi Indikator Kegunaan (<i>Usage</i>).....	99
4.2.8 Indeks Inklusi Keuangan.....	101
4.3 Keterkaitan Indeks Inklusi Keuangan Terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan.....	104
4.3.1 Uji Unit Root.....	104
4.3.2 Uji Kointegrasi.....	105
4.3.3 Uji Lag Optimal.....	107
4.3.4 Uji Kausalitas Granger.....	109
4.3.5 Uji Asumsi Klasik.....	113

BAB V PENUTUP.....	116
5.1 Kesimpulan	116
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	117
5.3 Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN.....	122

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Inklusi Keuangan Negara di Asia Tenggara.....	3
Tabel 1.2 Perkembangan Infrastruktur dan Dana Pihak Ketiga di Jawa Tengah 2010-2014.....	9
Tabel 2.1 Indikator Indeks dalam HDR.....	31
Tabel 2.2 Indikator Ketimpangan Menurut Bank Dunia (World Bank).....	39
Tabel 2.3 Definisi Inklusi Keuangan Menurut Beberapa Sumber.....	41
Tabel 3.1 Jenis dan Sumber Data.....	58
Tabel 4.1 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2010-2014.....	73
Tabel 4.2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2010-2014.....	75
Tabel 4.3 Indeks Gini Kab/Kota Jawa Tengah 2010-2014.....	77
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk > 15 tahun Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2010-2014.....	79
Tabel 4.5 Jumlah Rekening Deposito Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2010-2014.....	81
Tabel 4.6 Perkembangan Jumlah Kantor Cabang dan Cabang Pembantu Bank Umum Konvensional Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2010-2014.....	83
Tabel 4.7 Jumlah Dana Pihak Ketiga Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2010-2014.....	85
Tabel 4.8 Jumlah Rekening Deposito Per 1000 Populasi Dewasa Kab/Kota Jawa Tengah 2010-2014	87
Tabel 4.9 Jumlah Kantor Cabang dan Cabang Pembantu Per 100000 Populasi Kab/Kota Jawa Tengah 2010-2014.....	89
Tabel 4.10 Indikator Kegunaan Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2010-2014...	92
Tabel 4.11 Bobot, Batas Maksimum dan Minimum Untuk masing-masing Indikator Indeks Inklusi Keuangan.....	93
Tabel 4.12 Dimensi Indikator Penetrasi Perbankan Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2010-2014.....	95
Tabel 4.13 Indeks Dimensi Ketersediaan Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2010-2014.....	97
Tabel 4.14 Indeks Dimensi Kegunaan (Usage) Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2010-2014.....	99
Tabel 4.15 Indeks Inklusi Keuangan Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2010-2014.....	102
Tabel 4.16 Hasil Uji Unit Root Indeks Inklusi Keuangan, Gini dan Tingkat Kemiskinan.....	103
Tabel 4.17 Uji Kointegrasi Indeks Inklusi Keuangan dengan Indeks Gin....	105
Tabel 4.18 Uji Kointegrasi Indeks Inklusi Keuangan dengan Tingkat Kemiskinan.....	106
Tabel 4.19 Hasil Pengujian Lag Optimum Inklusi Keuangan dan Indeks Gini.....	107

Tabel 4.20 Hasil Pengujian Lag Optimum Inklusi Keuangan dan Tingkat Kemiskinan.....	107
Tabel 4.21 Hasil Pengujian Kausalitas Granger Indeks Inklusi Keuangan Terhadap Indeks Gini.....	108
Tabel 4.22 Hasil Pengujian Kausalitas Granger Indeks Inklusi Keuangan Terhadap Tingkat Kemiskinan.....	110
Tabel 4.23 Uji Multikolinearitas.....	114
Tabel 4.24 Uji Heteroskedastisitas.....	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Ketimpangan Indonesia Tahun 2010-2014.....	2
Gambar 1.2 Enam Pilar Strategi Nasional Keuangan Inklusif.....	6
Gambar 1.3 Rasio DPK/PDRB, Koefisien Gini dan Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah 2009-2014.....	12
Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse.....	23
Gambar 2.2 Kurva Lorenz.....	36
Gambar 2.3 Memperkirakan Koefisien Gini.....	38
Gambar 2.4 Perkembangan Sektor Perbankan Terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan.....	49
Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran.....	53
Gambar 3.1 Penjelasan secara Grafik dari Tiga Dimensi IIK.....	62
Gambar 4.1 Peta Administratif Jawa Tengah.....	70
Gambar 4.2 Pertumbuhan Ekonomi dan PDRD Provinsi Jawa Tengah 2010-2014.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Uji Unit Root Indeks Inklusi Keuangan	122
Lampiran B Uji Unit Root Indeks Gini.....	123
Lampiran C Uji Unit Root Tingkat Kemiskinan.....	124
Lampiran D Uji Kointegrasi Indeks Inklusi Keuangan Terhadap Indeks Gini .	125
Lampiran E Uji Kointegrasi Indeks Inklusi Keuangan Terhadap Tingkat Kemiskinan	126
Lampiran F Uji Lag Optimum	127
Lampiran G Uji Granger Causality	128
Lampiran H Uji Multikolinearitas.....	129
Lampiran I Uji Heteroskedastisitas.....	129

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

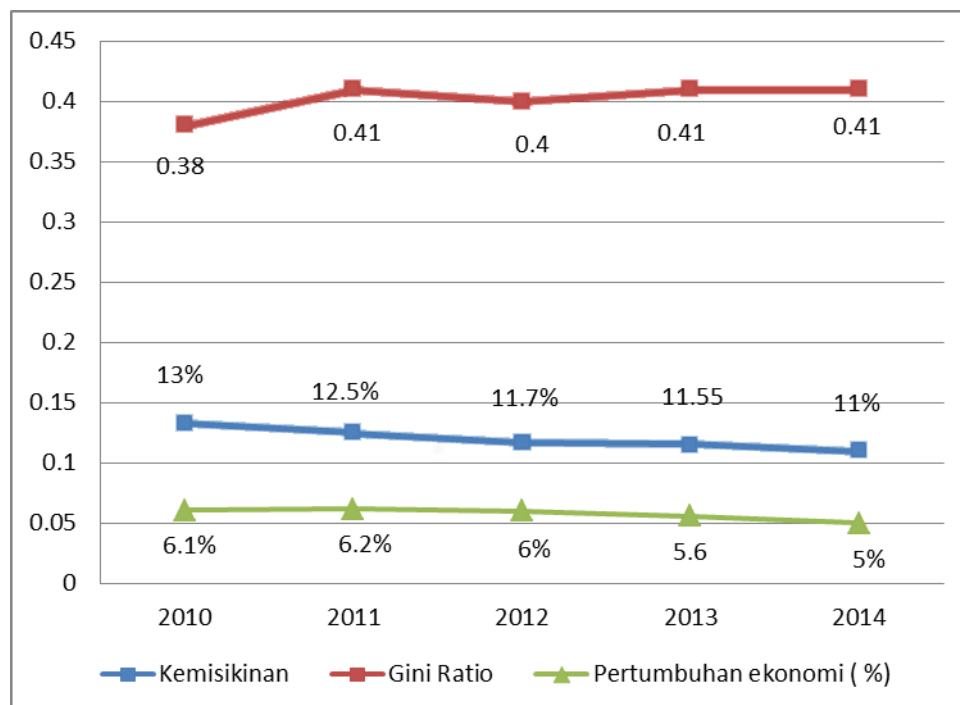
Indonesia adalah negara berkembang dengan perekonomian yang cukup baik. Berdasarkan *overview* ekonomi Bank Dunia, Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Hal tersebut didasari oleh keberhasilan Indonesia menjadi negara dengan pendapatan perkapita yang terus meningkat setiap tahun dimana dari \$ 560 di tahun 2000 menjadi \$ 3.630 pada 2014. Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi. Dimana pada tahun 2010 tumbuh sebesar 6.1% dan meningkat pada tahun 2011 menjadi 6.2 dan pada tiga tahun berikutnya mengalami perlambatan dimana pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 5%. Perlambatan ekonomi Indonesia ini disebabkan oleh banyak faktor baik faktor dalam negeri ataupun faktor guncangan ekonomi internasional yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Walaupun ekonomi Indonesia mengalami perlambatan tetapi masih dalam keadaan baik. Saat ini, Indonesia adalah keempat negara berpenduduk terbesar di dunia dan ekonomi terbesar ke-10 dalam hal paritas daya beli, dan anggota dari G-20. Bank Dunia (2015).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat menunjukkan adanya peningkatan pembangunan ekonomi yang lebih baik. Tetapi kenyataan yang ada

pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung meningkat belum mencapai pertumbuhan yang berkualitas dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia belum dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. pertumbuhan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas menurut Biro Anggaran dan Pelaksanaan APBN dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan.

Hal ini dapat terlihat dari masih tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan, dimana hingga tahun 2014 indeks gini Indonesia cenderung memburuk 4,1% dan masih ada 28 juta masyarakat Indonesia yang berada dalam tingkat kemiskinan absolut (Badan Pusat Statistik, 2014).

Gambar 1.1
Perkembangan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Ketimpangan Indonesia Tahun 2010-2014



Sumber : bps.go.id

Dalam berbagai literatur telah banyak penelitian tentang pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Tetapi lebih banyak berfokus pada peran kebijakan fiskal dalam mengatasi hal tersebut baik melalui instrumen redistribusi (pajak dan transfer) yang sebagian besar mempengaruhi kebijakan distribusi pendapatan saat ini, atau dalam bentuk (terutama program pendidikan dan kesehatan). Tentunya hal ini merupakan kebijakan pemerintah dalam mencapai kesejahteraan rakyatnya. Tetapi diluar hubungan kebijakan fiskal ini, ada kebijakan dalam hal keuangan yang meningkatkan minatnya dalam pembangunan yang berdampak pada kemiskinan dan ketimpangan.

Dimana kendala masyarakat miskin adalah pendapatan yang rendah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan standar dan menyebabkan mereka tidak memiliki tabungan, hal ini berdampak pada kurangnya akses ke instrumen keuangan. Maka dari itu jika dilihat dari segi akses masyarakat terhadap keuangan formal, posisi Indonesia masih berada dibawah beberapa negara ASEAN.

Tabel 1.1
Indeks Inklusi Keuangan Negara di Asia Tenggara

Negara	Indeks Inklusi Keuangan (dalam persen)	Ranking
Singapura	58.24	25
Malaysia	47.09	41
Thailand	45.59	45
Indonesia	24.85	101
Myanmar	24.36	102

Sumber : ADB Economics Working Paper (Cyn-Young Park dan Rogelio V.Mercado Jr.)

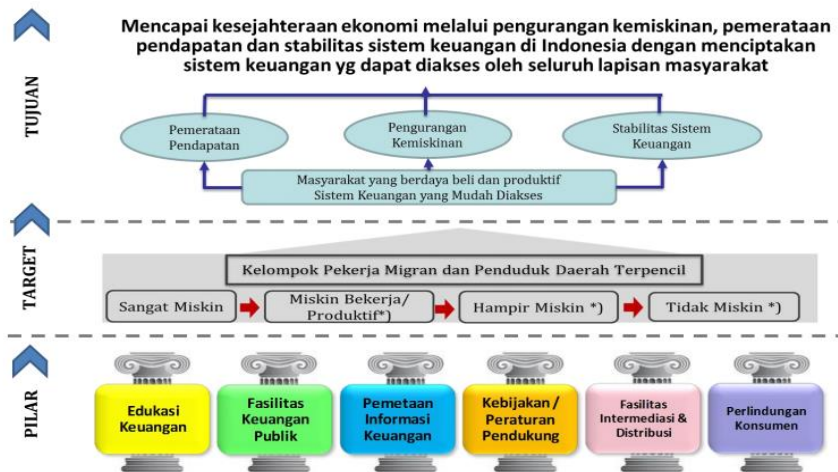
Hasil penelitian Asian Development Bank pada tabel 1.1 tentang inklusi keuangan di negara-negara berkembang di Asia untuk kawasan Asia Tenggara tingkat literasi keuangan tertinggi adalah Singapura mencapai 58,24 persen dan berada dalam urutan 25 dari 176 negara dan selanjutnya adalah Malaysia mencapai 47,09 persen dan berada dalam urutan 41 dari 176 negara. Untuk Indonesia tingkat literasi keuangan masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya dimana Indonesia berada dalam urutan 102 dari 176 negara dengan tingkat literasi 24,36 persen. Tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN mengindikasikan bahwa peningkatan dan pemerataan akses keuangan untuk masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan.

Menurut Bank Indonesia penyebab masih rendahnya akses keuangan masyarakat di Indonesia adalah dari sisi penyedia jasa layanan perbankan (*supply*), maupun dari sisi masyarakat sendiri sebagai pengguna layanan perbankan (*demand*), yaitu karena harga produk perbankan yang mahal dan belum bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat (*price barrier*), selain itu masih kurangnya informasi (*information barrier*), design produk barrier (produk yang cocok) dan sarana yang sesuai (*channel barrier*). Hal tersebut didukung oleh penelitian Dewi (2014) dimana salah satu penyebab rendahnya literasi keuangan di Indonesia disebabkan oleh kondisi geografis dimana 60 persen adalah pedesaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kombinasi antara informasi tentang perbankan dan harga serta kondisi geografis menyulitkan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, sehingga banyak masyarakat masuk dalam

kategori *unbanked people*. Masyarakat tersebut masuk dalam kategori masyarakat yang memiliki *financial literacy* yang rendah. Untuk mengatasi berbagai penyebab masih rendahnya literasi keuangan di Indonesia maka muncul program perluasan akses keuangan yang disebut dengan inklusi keuangan. Inklusi keuangan adalah konsep yang luas. Seperti yang didefinisikan oleh (Sarma, 2008), inklusi keuangan adalah proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan, dan penggunaan sistem keuangan formal untuk semua anggota ekonomi.

Saat ini, inklusi keuangan telah menjadi agenda penting di berbagai negara termasuk Indonesia. Pada bulan Juni 2012, Bank Indonesia bekerjasama dengan Sekretariat Wakil Presiden - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Kebijakan Fiskal - Kementerian Keuangan mengeluarkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Program ini dibentuk untuk mendukung pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang ditunjukkan oleh Gambar 1.2 visi utama dari strategi keuangan inklusif ini adalah mencapai kesejahteraan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia dengan menciptakan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai visi tersebut maka diperlukan misi yang dituangkan dalam strategi keuangan inklusif dijabarkan dalam 6 pilar yaitu edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan/peraturan pendukung, fasilitas intermediasi dan distribusi, serta perlindungan konsumen.

Gambar 1.2
Enam Pilar Strategi Nasional Keuangan Inklusif



Sumber : Booklet Keuangan Inklusif Bank Indonesia

Setelah menetapkan enam pilar strategi nasional keuangan Inklusif maka perlu menetapkan siapa yang menjadi target dari strategi tersebut, dimana berdasarkan Gambar 1.2 target utama dari strategi ini adalah kelompok migran dan penduduk daerah terpencil yang masuk dalam kategori masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan dalam hal akses keuangan. Setelahnya hal terpenting adalah tujuan dari strategi ini adalah menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan. Keuangan yang semakin inklusif dapat memberikan akses terhadap jasa keuangan yang lebih luas bagi setiap penduduk, terutama bagi kelompok miskin dan marjinal yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan. Masyarakat miskin memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi hidupnya menjadi lebih sejahtera dengan mengakses layanan keuangan. Hal ini dapat mendorong

pendapatan masyarakat miskin semakin meningkat sehingga kesenjangan pendapatan dapat berkurang. Hal tersebut didukung oleh Rakhmindyarto dan Syaifullah (2014:1) bahwa sistem keuangan yang inklusif akan mampu memberdayakan individu untuk mampu mengakses layanan keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun, dan fasilitas pembayaran, sehingga sangat membantu masyarakat khususnya kelompok berpendapatan rendah untuk meningkatkan pendapatannya, mengakumulasikan kekayaannya, dan mengelola risiko, serta upaya untuk keluar dari kemiskinan.

Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan keuangan inklusif diperlukan suatu ukuran kinerja. Sarma (2012) mengembangkan alat ukur untuk mengukur tingkat inklusi keuangan suatu wilayah dengan merumuskan indeks inklusi keuangan. Dimana perumusan indeks ini dibagi menjadi 3 dimensi atau indikator yaitu penetrasi perbankan, ketersediaan akses terhadap layanan perbankan dan indikator usage (kegunaan).

Indikator penetrasi bank adalah sejauh mana setiap orang dalam suatu perekonomian memiliki rekening bank. Dimana dalam hal ini menggunakan rekening bank sebagai proporsi dari total penduduk sebagai indikator dari penetrasi perbankan. Indikator ketersediaan akses hal ini berkaitan dengan ketersediaan layanan perbankan ditunjukkan dengan jumlah outlet bank atau nomor ATM yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Apabila masyarakat semakin bisa menjangkau akses perbankan maka akan memberdayakan individu yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk indikator kegunaan (usage) adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman

masyarakat terhadap penggunaan produk-produk perbankan dalam aktivitas perekonomian. Hal tersebut diperlukan karena tingkat literasi keuangan yang rendah menyebabkan “*unbanked people*” maka pemahaman terhadap produk-produk perbankan juga masih rendah.

Pemaparan indeks pengukuran inklusi keuangan dapat menjelaskan bahwa semakin tinggi indeks inklusi keuangan suatu wilayah berhubungan terhadap pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Indeks inklusi keuangan dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui perkembangan kegiatan keuangan disuatu wilayah dan menunjukkan sejauh mana strategi nasional keuangan inklusif yaitu pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Keberhasilan pelaksanaan keuangan inklusif dapat tercapai jika masyarakat di semua wilayah di Indonesia memiliki akses keuangan yang sama dan merata.

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar. Jika dilihat dari kajian ekonomi regional Jawa Tengah merupakan provinsi dengan perekonomian yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2015 sebesar 5,4% meningkat dibanding tahun 2014 (5,3%), dan jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 (4,79%). Provinsi Jawa Tengah mempunyai proporsi yang besar terhadap struktur perekonomian Indonesia tahun 2015 secara keseluruhan yaitu sebesar 8,8% (Kajian Fiskal Regional Jawa Tengah, 2015). Pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga didukung oleh perkembangan perbankan Jawa Tengah yang cukup baik. Perkembangan perbankan juga dapat dilihat dari infrastruktur fisik yaitu jumlah bank dan jumlah kantor cabang yang

didirikan di daerah-daerah dan juga jumlah dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh Bank di Jawa Tengah

Tabel 1.2
Perkembangan Infrastruktur dan Dana Pihak Ketiga di Jawa Tengah 2010-2014

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Bank	318	344	342	361	337
Jumlah Kantor Bank Umum	4270	4054	4359	4495	4504
Jumlah DPK (dalam Miliar Rupiah)	104,603	123,600	143,893	167,837	186,678

Sumber : Bank Indonesia

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah bank di Jawa Tengah dari tahun 2009-2014 cenderung mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2014 terjadi penurunan hal tersebut diakibatkan oleh berkurangnya jumlah bank perkreditan rakyat pada tahun 2013 ke 2014 sebesar 24 jumlah bank, sedangkan untuk jumlah bank umum meningkat pada tahun 2012 ke 2013 sebesar 19 jumlah bank umum dan untuk tahun 2014 tidak ada penambahan jumlah bank umum. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan jumlah bank di Jawa Tengah juga berdampak pada perkembangan jumlah kantor bank di Jawa Tengah dapat diketahui bahwa jumlah kantor bank di Jawa Tengah dari 2009-2014 mengalami peningkatan yang cukup besar dimana pada tahun 2014 mencapai 4504 kantor bank.

Peningkatan jumlah kantor bank, maka jumlah dana yang dapat dihimpun dari masyarakat juga meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya Dana Pihak Ketiga ,dimana DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Komponen DPK terdiri dari tabungan (*saving*

deposit), *deposito (time deposit)* dan *giro (demand deposit)*. Untuk jumlah Dana Pihak Ketiga di Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2009-2014 dapat dilihat dari grafik 1.5 dimana jumlah dana pihak ketiga di bank umum mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2014 jumlah simpanan masyarakat di bank umum mencapai 186,678,896 miliar rupiah dan menjadi penyumbang terbesar untuk total jumlah simpanan masyarakat di Jawa Tengah sebesar 200,139,020 miliar rupiah dan untuk jumlah simpanan di Bank perkreditan rakyat mencapai 13,460,123 miliar rupiah.

Seiring dengan berkembangnya sektor perbankan, distribusi layanan jasa perbankan juga harus merata. Meskipun jumlah kantor cabang bank, DPK yang terhimpun, namun masih terdapat masyarakat Jawa Tengah yang belum dapat mengakses jasa perbankan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Kepala OJK Regional Jawa Tengah dan DIY, Panca Hadi Suryatno, menyebutkan tingkat literasi keuangan masyarakat Jawa Tengah sebesar 19,25 persen, dengan tingkat inklusi sebesar 41 persen. Angka indeks Jawa Tengah berada di bawah indeks nasional, dan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia adalah sebesar 21,84 persen dan tingkat inklusi sebesar 59,7 persen angka indeks tersebut menunjukkan bahwa, dari 33 juta orang penduduk Jawa Tengah, hanya sekitar 6,4 juta orang setara dengan 19,25 persen yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan. Asumsinya dari 100 orang penduduk Jawa Tengah, hanya 19 orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan. (Kompas.com 4 Maret 2016).

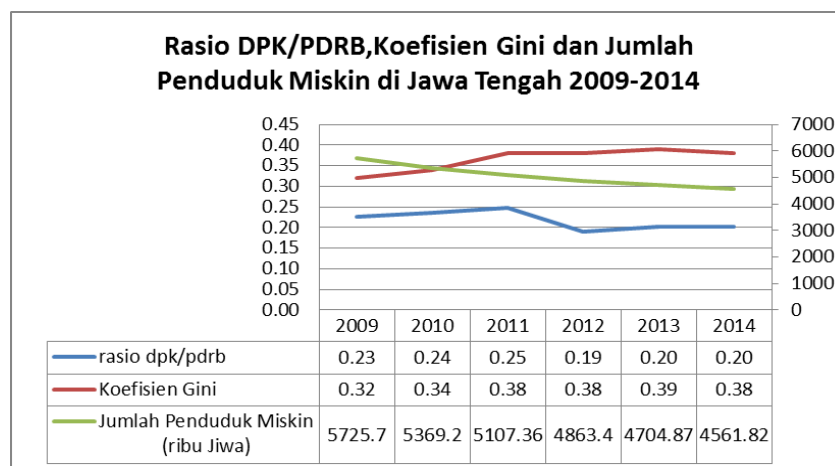
Berdasarkan pernyataan diatas inklusi keuangan di Jawa Tengah yang masih rendah menunjukkan bahwa akses keuangan belum dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Padahal wilayah dengan sistem inklusi keuangan yang semakin baik akan membantu masyarakat dalam mengakses layanan jasa, meningkatkan kemampuan penggunaan produk-produk perbankan. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu penelitian yang mendukung bahwa pembangunan sektor perbankan dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan adalah Pembangunan sektor keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dua jalur (Tiwari *et al.* 2013). Pertama, kredit yang lebih murah membuat investasi semakin menarik, dimana pengusaha kecil memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Kemudahan akses terhadap modal bagi pengusaha dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan output, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Jalur kedua, meminjam dengan biaya rendah memberi keuntungan bagi masyarakat miskin untuk investasi pendidikan dan kesehatan. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan jalan keluar dari perangkap kemiskinan.

Adanya perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat miskin melalui akses jasa keuangan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi. Akses perbankan yang mudah bagi kelompok masyarakat miskin ini dapat meningkatkan efisiensi alokasi modal, yang dapat mempercepat pertumbuhan agregat, dan mengurangi hambatan dalam akses kredit produktif, yang dapat meningkatkan

kesejahteraan hidup masyarakat miskin sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ini secara tidak langsung dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Tetapi di Jawa Tengah menunjukkan hal yang sebaliknya, perkembangan perbankan yang meningkat searah dengan ketimpangan pendapatan semakin besar.

Gambar 1.3
Rasio DPK/PDRB, Koefisien Gini dan Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah 2009-2014



Sumber: Bank Indonesia, BPS (diolah)

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa jumlah DPK yang dihimpun oleh bank umum terhadap PDRB dari tahun ke tahun berfluktuasi dan cenderung ke arah mengalami peningkatan. Namun peningkatan tersebut tidak diikuti oleh semakin membaiknya pemerataan pendapatan. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik bahwa ketimpangan di Jawa Tengah untuk tahun ke tahun mengalami peningkatan dimana pada tahun 2014 koefisien gini Jawa Tengah mencapai 0,38. Sedangkan untuk kemiskinan di Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami trend menurun

dimana pada tahun 2013 sebesar 4704,87 ribu jiwa dan mengalami penurunan pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin sebesar 4561,82 ribu jiwa.

Pernyataan yang mendukung terkait pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan adalah menurut Cyn-Young Park (2015) yang mengaitkan inklusi keuangan dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan negara-negara berkembang di Asia menyatakan bahwa inklusi keuangan adalah salah satu strategi untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan keuangan dan sering dianggap sebagai alat yang efektif yang dapat membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang lebih rendah. Dan Presiden Kelompok Bank Dunia, Jim Yong Kim (2015) akses terhadap layanan keuangan dapat membantu masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Honohan (2007) indeks akses keuangan mempengaruhi secara signifikan untuk menurunkan ketimpangan pendapatan. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Allen *et Al.*(2013) menemukan bahwa dengan adanya bank komersial dapat membantu meningkatkan akses keuangan masyarakat miskin di Kenya.

Pembangunan sektor keuangan, terutama sektor perbankan, dapat meningkatkan akses dan penggunaan jasa perbankan oleh masyarakat. Semakin terbukanya akses terhadap jasa keuangan, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan akses tersebut serta meningkatkan pendapatannya melalui penyaluran kredit oleh lembaga keuangan terutama apabila digunakan untuk kegiatan produktif. Sulitnya akses terhadap jasa keuangan menyebabkan masyarakat miskin harus mengandalkan tabungan yang terbatas untuk investasi dan pengusaha kecil harus mengandalkan laba untuk meneruskan usaha.

Akibatnya, ketimpangan pendapatan tidak berkurang dan pertumbuhan ekonomi melambat (Allen *et al.* 2012).

1.2 Rumusan Masalah

Perekonomian Jawa Tengah yang semakin berkembang yang dapat dilihat dari trend pertumbuhan ekonomi yang tumbuh walaupun pada tahun-tahun terakhir mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang semakin baik ternyata belum dapat mensejahterakan masyarakatnya, dimana kemiskinan masih menjadi persoalan dalam perekonomian Jawa Tengah dengan tingkat kemiskinan 4,5 juta penduduk miskin. Terlebih lagi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah juga belum dinikmati oleh semua lapisan masyarakat karena ketimpangan di Jawa Tengah yang setiap tahun semakin meningkat. Kemiskinan dan ketimpangan merupakan masalah ekonomi-sosial yang masih menjadi persoalan yang belum bisa diselesaikan.

Secara umum, kemiskinan menyebabkan keterbatasan baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang / kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya, sehingga dalam setiap aktifitas maupun usaha menjadi sangat terbatas. Dimana kendala masyarakat miskin adalah pendapatan yang rendah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan standar dan menyebabkan mereka tidak memiliki tabungan, hal ini berdampak pada kurangnya akses ke instrumen keuangan.

Perkembangan perbankan memang terjadi di Jawa Tengah tetapi ketimpangan justru semakin besar dan kemiskinan yang masih ada walaupun memiliki trend cenderung yang menurun tetapi tetap menjadi sebuah masalah dalam perekonomian. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait hubungan perbankan di Jawa Tengah terhadap pemerataan pendapatan dan kemiskinan. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai keuangan inklusi terhadap pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Dan berdasarkan data-data pendukung maka wilayah penelitian adalah Jawa Tengah untuk tingkat kabupaten dan kota. Maka dari itu pertanyaan untuk penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat inklusi keuangan di kab/kota di Jawa Tengah ?
2. Bagaimana hubungan inklusi keuangan dengan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di kab/kota di Jawa Tengah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Menganalisis tingkat inklusi keuangan di kab/kota di Jawa Tengah.
2. Untuk Menganalisis hubungan inklusi keuangan mempengaruhi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di kab/kota di Jawa Tengah.

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut dalam aspek yang sama maupun aspek yang berhubungan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dimasa yang akan datang dalam rangka mengatasi ketimpangan dan kemiskinan yang terjadi pada tiap daerah di Propinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama kuliah.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan dan Bab V kesimpulan.

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan Landasan Teori , Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran Teoritis, dan Hipotesis Penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan Variabel Penelitian dan Definisi Operasional, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data serta Metode Analisis Data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menuraikan Deskripsi Objek Penelitian, Hasil Perhitungan dan Pengujian Hipotesis.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan Kesimpulan, Keterbatasan Penelitian dan Saran-saran.